

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sarana dan fasilitas yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada rakyat, menegakkan hukum, memelihara ketertiban dan keamanan negara. Dari kenyataan di atas maka sangat banyak dana yang harus disediakan oleh penyelenggara negara atau pemerintah untuk membiayai seluruh kewajiban-kewajibannya. Dalam usaha untuk dapat menyediakan sejumlah dana yang diperlukan tersebut pemerintah disamping harus mencetak uang dan mendapatkan pinjaman juga menggali sumber-sumber penghasilan terutama dari sumber penerimaan berbagai macam pajak, retribusi, bea dan cukai serta bentuk-bentuk pungutan lainnya.

Pembangunan nasional juga merupakan rangkaian usaha pembangunan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam UUD 1945. Perwujudan dari tujuan nasional ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan yang berkedaulatan rakyat dan demokratis. Penyelenggaraan negara yang dilaksanakan melalui pembangunan nasional yang meliputi aspek kehidupan bangsa yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh lembaga tertinggi dan tinggi negara bersama-sama dengan seluruh rakyat Indonesia (GBHN : 1999 – 2004).

Pembangunan nasional pada dasarnya merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan global dunia (GBHN : 1999–2004). Pendanaan kegiatan kenegaraan ini sebaiknya diusahakan diluar pencetakan uang dan pinjaman. Hal ini ditujukan agar laju inflasi tidak melambung tinggi. Inflasi adalah semacam pajak yang penerapannya tidak pandang bulu atau tidak proporsional, maksud dari perkataan ini adalah adanya pernyataan dalam pungutan atau penentuan pajak yang dikenakan tanpa sepengetahuan pemilik uang diantaranya masyarakat yang mampu dan kurang mampu (Boediono : 1994, 155).

Diantara sekian alternatif sumber-sumber penerimaan negara yang ada, maka pajak merupakan sumber daya yang paling dominan untuk membiayai pengeluaran. Pengeluaran negara, jika dibandingkan dengan penerimaan-penerimaan yang diperoleh negara dari sektor lain pembangunan yang dilaksanakan dewasa ini bertambah besar dan ruang lingkupnya juga bertambah luas. Pembangunan dibutuhkan dalam rangka untuk mempertahankan dan memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah ada yang dicapai selama ini. Program pembangunan ini juga bertujuan agar tingkat kemakmuran yang diperoleh masyarakat semakin baik dan sejahtera.

Dari uraian di atas menurut pemerintah untuk mengusahakan peningkatan perolehan dana yang jumlahnya bertambah besar. Dana yang diperoleh selanjutnya dipergunakan antara lain untuk melanjutkan program

pembangunan yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang diambil dari sektor pajak. Namun sejauh mana layanan informasi yang diberikan oleh aparatur pajak mampu mendorong kesadaran wajib pajak untuk taat membayar pajak yang diharapkan mampu menimbulkan atau menghasilkan insan-insan yang mempunyai kepedulian terhadap ketaatan membayar pajak. Bagaimana pula sikap dan tanggapan yang diberikan masyarakat sebagai warga negara terhadap pembayaran pajak masih perlu mendapatkan perhatian yang cukup besar, mengingat besarnya kontribusi yang diberikan untuk mendukung pembangunan. Pembayaran pajak yang tepat waktu akan mempermudah dalam pengelolaan pajak dan sangat membantu pemerintah dalam menjalankan program pembangunannya. Namun kondisi rakyat Indonesia yang majemuk dan kompleks baik dari segi latar belakang perekonomian, politik, budaya maupun jenjang pendidikan yang pernah ditempuh dalam pelaksanaan pembayaran pajak tanggapan yang diberikan sangat bermacam-macam.

Sikap taat membayar pajak di Indonesia masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari jumlah wajib pajak yang dinyatakan patuh hanya sebesar 262 wajib pajak badan (Kompas, 2004, Anggita Abimanyu : Kepala Badan Analisa Fiskal) dengan jumlah wajib tambahan selama triwulan I tahun 2003 sebesar 6.245 wajib pajak badan.

Wajib pajak dikatakan patuh atau taat apabila :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan dalam dua tahun terakhir.

2. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. SPT yang terlambat sebagaimana di maksud dalam butir 2 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mempunyai izin untuk mengatur atau menunda.
5. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
6. Dalam hal ini laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pendapat harus wajar tanpa syarat atau wajar dengan pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba-rugi fiskal, (Kompas 2004, Anggita Abimanyu : Kepala Badan Fiskal).

Melihat uraian di atas bukanlah hal yang mudah untuk mengusahakan peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak. Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini diambil judul : "PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN WAJIB PAJAK DAN EFEKTIFITAS LAYANAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP SIKAP KETAATAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah tingkat pendidikan wajib pajak berpengaruh terhadap sikap ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak ?
2. Apakah efektifitas layanan informasi perpajakan berpengaruh terhadap sikap ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak ?
3. Apakah tingkat pendidikan wajib pajak dan efektifitas layanan informasi perpajakan berpengaruh terhadap sikap ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak?

C. BATASAN MASALAH

Mengingat beragamnya masalah yang mempengaruhi sikap wajib pajak dalam membayar pajak, maka penelitian ini dibatasi pada :

1. Permasalahan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, terutama yang terkait dengan UU perpajakan khususnya tentang pajak penghasilan No. 17 tahun 2000 yang dikenakan pada badan atau bentuk-bentuk usaha tetap khususnya pada perusahaan industri dan kerajinan di Kabupaten Magetan.
2. Penelitian dilakukan di perusahaan industri dan kerajinan di kabupaten Magetan.

D. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh tingkat pendidikan masyarakat terhadap ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak di Kabupaten Magetan.
2. Mengetahui pengaruh efektifitas layanan informasi perpajakan terhadap sikap ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak di Kabupaten Magetan.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan agar bermanfaat bagi :

1. Bagi peneliti

Sebagai sarana belajar yang mengedepankan pola pikir yang ilmiah dalam menyikapi fenomena yang ada dan berkembang dalam masyarakat dengan berfikir kritis, rasional, sistematis dan analisis.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Dengan mengetahui efektif tidaknya layanan yang diberikan serta tingkat kesejahteraan dimiliki oleh wajib pajak yang diharapkan mampu memberikan masukan untuk mengelola agar pelayanan lebih baik dengan harapan agar penerimaan dari sektor pajak naik.

3. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan perpustakaan dan penelitian bagi mahasiswa Universitas Widya Mandala khususnya dan mahasiswa universitas lain pada umumnya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Berisi mengenai pengertian pajak dan unsurnya, sikap taat membayar pajak, tingkat pendidikan wajib pajak, efektifitas layanan informasi, penelitian terdahulu, hipotesis, dan kerangka konseptual.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini berisi desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional instrumen penelitian, lokasi dan waktu penelitian, prosedur pengumpulan data dan teknik analisis.

Bab IV Analisa Data

Membahas tentang analisis data yang terkumpul, pengujian data, hasil analisis dan pembahasan.

Bab V Simpulan, Keterbatasan dan Saran

- a. Simpulan
- b. Keterbatasan
- c. Saran